



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

...

DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2021



pariwisata.sultengprov.go.id



[dinas pariwisata sulawesi tengah](#)



[dinaspariwisatasulteng](#)



[dinas pariwisata sulteng](#)

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun. Laporan ini pada khususnya menggambarkan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Dari hasil Evaluasi Kinerja, diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah pada 2021 dengan dukungan dana APBD **sebesar Rp. 21.477.184.003,-** Dari anggaran yang tersedia tersebut dapat direalisasikan sebesar **Rp. 19.771.646.738,-** atau sebesar **92,06%.**

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam upaya pengoptimalisasian kinerja sehingga sangat diperlukan koreksi / perbaikan dan penyempurnaan secara optimal dan menyeluruh pada kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepada pihak-pihak terutama kepada seluruh pejabat dan staf Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang telah bekerjasama dalam pencapaian program kegiatan yang dilakukan tahun 2021, kami tak lupa menyampaikan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian didalam meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme dibidang tugas masing-masing.

Palu, Januari 2022

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19640919 199003 1 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
SISTIMATIKA PENULISAN	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Tujuan Penulisan Laporan	3
1.4. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Prov.Sulawesi Tengah...	3
1.5. Sistematika Laporan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Tujuan dan Sasaran	12
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021.....	13
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2021.....	16
3.1. Capaian Kinerja	16
3.2 Realisasi Anggaran	28
BAB IV P E N U T U P	33
4.1. Kesimpulan	33
4.2. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kinerja	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	

SISTIMATIKA PENULISAN

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas keadaan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan serta penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2021.

Bab II - Perencanaan Kinerja, menjelaskan Visi dan Misi serta muatan rencana strategis/kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021.

Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 merupakan presentasi hasil pelaksanaan tugas selama 1 (tahun) yang dapat dijadikan sebagai alat kontrol bagi setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menyajikan seluruh capaian kinerja dari semua sasaran dan kegiatan selama tahun 2021. Penilaian capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan target atau rencana kerja dengan realisasinya dari indikator kinerja input, output dan outcomes.

Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, yang sangat ditekankan adalah kinerja sasaran. Hal ini sesuai dengan program pembangunan berbasis kinerja yang disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan **5 (Lima) program dan 15 (Lima Belas) kegiatan** dengan total anggaran sebesar **Rp. Rp. 21.477.184.003,-** dengan realisasi sebesar **Rp. Rp. 19.771.646.738,-** atau sebesar **92,06%**.

Capaian Kinerja selama tahun 2021 adalah wujud dari keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan Pariwisata. Program yang telah dicapai di tahun 2021 ini adalah (1). Peningkatan Daya Tarik Wisata, (2). Pemasaran Pariwisata, (3). Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, (4). Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, (5). Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Harapan kami dengan selesainya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan

pembangunan daerah Sulawesi Tengah, khususnya dalam Bidang Pariwisata pada masa kini dan masa akan datang.

Palu, Januari 2022

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19640919 199003 1 019

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan pembangunan yang sedang dilaksanakan dalam berbagai bidang, pembangunan bidang pariwisata perlu menjadi perhatian karena bidang tersebut memiliki potensi yang sangat besar dan akan berdampak positif terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Perkembangan pariwisata pada hakekatnya adalah perwujudan kemampuan Sumber Daya Manusia untuk mengembangkan diri secara aktif terhadap lingkungan, karena hal tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah. Sektor Pariwisata memiliki peran yang strategis dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian lokal maupun nasional.

Disamping itu pelestarian dan pengembangan pariwisata untuk menumbuhkan pemahaman dan perkembangan masyarakat terhadap pariwisata, meningkatkan kualitas kehidupan dan memperkuat ketahanan bangsa, yang pada akhirnya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah unsur pelaksana teknis pemerintah provinsi di bidang pembangunan pariwisata, mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai perumus kebijakan dan koordinator dalam upaya pengembangan kepariwisataan daerah. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mampu berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja tahun 2019 tersebut maka Dinas Pariwisata Provinsi

Sulawesi Tengah menyusun Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) hasil Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 75 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata.

1.3 Tujuan Penulisan Laporan

Tujuan Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 mempunyai tujuan melaporkan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan sarana bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan. Selain itu sebagai bahan evaluasi, secara makro diantaranya pengembangan kepariwisataan, sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja sektor kepariwisataan.

1.4 Gambaran Umum Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

a. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata; .

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 75 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

- Kepala Dinas

- Sekretaris

1. Sub Bagian Program
2. Sub Bagian Keuangan dan Asset, dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- Bidang Pemasaran Pariwisata

1. Seksi Pengembangan Segmen Pasar, Personal Bisnis dan Pemerintah
2. Seksi Analisa Data Pasar dan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata
3. Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata

- Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Seksi Perwilayahan dan Investasi Pariwisata
2. Seksi Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata
3. Seksi Atraksi dan Tata Kelola Destinasi

- Bidang Pengembangan Industri Pariwisata

1. Seksi Kemitraan Usaha Pariwisata
2. Seksi Standar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata
3. Seksi Investasi Usaha Pariwisata

- Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

1. Seksi Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Usaha
2. Seksi Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan
3. Seksi Pengendalian dan Transformasi Kepariwisataan

b. Tugas Sekretariat dan Bidang-Bidang

1. SEKRETARIAT DINAS

Sekretariat Dinas dikepalai oleh seorang pejabat Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengelolaan kepegawaian dan umum, dan korpri di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum dan Korpri.
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum dan Korpri.
3. Penyiapan bahan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum dan Korpri.
4. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum dan Korpri.

5. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum dan Korpri.
6. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan, dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh 3 pejabat eselon IV yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Program
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

2. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

Bidang Pemasaran Pariwisata dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengembangan segmen pasar, personal bisnis dan pemerintah, pengembangan analisis data pasar, pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata dan strategi pemasaran pariwisata.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan segmen pasar, personal bisnis dan pemerintah, pengembangan analisis data pasar, pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata dan strategi pemasaran.
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan segmen pasar, personal bisnis dan pemerintah, pengembangan analisis data pasar, pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata dan strategi pemasaran.
3. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengembangan segmen pasar, personal bisnis dan pemerintah, pengembangan analisis data

pasar, pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata dan strategi pemasaran.

4. Pelaksanaan penyelenggaraan strategi pemasaran pariwisata dan mancanegara dan nusantara, analisi data pasar, pengembangan segmen pasar, personal bisnis dan pemerintah, serta komunikasi pemasaran pariwisata berdasarkan program dan kebijakan untuk pengembangan pemasaran pariwisata.
5. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengembangan segmen pasar, personal bisnis dan pemerintah, pengembangan analisa pasar, komunikasi pemasaran pariwisata dan strategi pemasaran pariwisata.
6. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan pemasaran pariwisata.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan oleh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dibantu oleh 3 Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai seksinya masing-masing yaitu :

1. Kepala Seksi Pengembangan Segmen Pasar, Personal Bisnis dan Pemerintah
2. Kepala Seksi Analisa Data Pasar dan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, dan
3. Kepala Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata

3. BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Bidang Pengembangan Destinasi dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyiapan bahan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi perwilayahan, investasi pariwisata, infrastruktur dan ekosistem pariwisata, atraksi dan tata kelola destinasi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, kepala bidang pengembangan destinasi pariwisata mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perwilayahan dan investasi pariwisata, infrastruktur dan ekosistem, atraksi dan tata kelola *destinasi*.
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perwilayahan dan investasi pariwisata, infrastruktur dan ekosistem, atraksi dan tata kelola *destinasi*.
3. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perwilayahan dan investasi pariwisata, infrastruktur dan ekosistem, atraksi dan tata kelola *destinasi*.
4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang perwilayahan dan investasi pariwisata, infrastruktur dan ekosistem, atraksi dan tata kelola *destinasi*.
5. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan destinasi pariwisata.
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dibantu oleh tiga kepala seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Perwilayahan dan Investasi Pariwisata
2. Kepala Seksi Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata
3. Kepala Seksi Atraksi dan Tata Kelola Destinasi

4. BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata, dan pembinaan ekonomi kreatif.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengembangan Industri mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata dan pembinaan ekonomi kreatif.
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata dan pembinaan ekonomi kreatif.
3. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata dan pembinaan ekonomi kreatif.
4. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata dan pembinaan ekonomi kreatif.
5. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan industri pariwisata.
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dibantu oleh tiga Kepala Seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Kemitraan Usaha Pariwisata
2. Kepala Seksi Standar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
3. Kepala Seksi Investasi Usaha Pariwisata.

5. BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata di pimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata, penelitian dan pengembangan kepariwisataan dan pengendalian dan transformasi kepariwisataan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang pengembangan Kelembagaan Kepariwisata memiliki fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan SDM aparatur dan mitra pariwisata, penelitian pengembangan kepariwisataan serta pengendalian transformasi kepariwisataan.
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan SDM aparatur dan mitra pariwisata, penelitian pengembangan kepariwisataan serta pengendalian transformasi kepariwisataan.
3. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengembangan SDM aparatur dan mitra pariwisata, penelitian pengembangan kepariwisataan serta pengendalian transformasi kepariwisataan.
4. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengembangan SDM aparatur dan mitra pariwisata, penelitian pengembangan kepariwisataan serta pengendalian transformasi kepariwisataan.
5. Pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja pariwisata, workshop/bimtek pengembangan SDM aparatur dan mitra usaha kepariwisataan.
6. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan kelembagaan kepariwisataan.
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata di bantu oleh tiga kepala seksi, yaitu :

1. Kepala Seksi Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata.
2. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata.
3. Kepala Pengendalian dan Transformasi Kepariwisata

1.5 Sistematika Laporan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan Latar Belakang disusunnya Laporan Kinerja - Instansi Pemerintah, Landasan Hukum, Tujuan Penulisan Laporan, Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah serta Sistematika Laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan tentang acuan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian dari Renstra tersebut akan di turunkan dalam bentuk Renja sebagai dasar Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang selanjutnya tertuang lebih terinci sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Capaian Kinerja dan Realisasi pelaksanaan dalam dokumen DPA tersebut di jabarkan dalam program dan kegiatan yang di syahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan pada tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja dan capaiannya.

Bab III Akuntabilitas Kineja

Pada bab ini diuraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi sebagaimana dalam penjabarannya secara analisis capaian kinerja dinas sesuai dengan dokumen Revisi Renstra 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja dan capaiannya secara rinci dan jelas. Selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusinya serta analisis penggunaan sumber daya anggaran. Realisasi anggaran diuraikan berdasarkan sumber pendanaan. Selanjutnya diselaraskan dengan realisasi anggaran PAD dan pendanaan APBD yang diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2021.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisikan Penutup yang menguraikan tentang tiga hal yaitu kesimpulan, permasalahan dan kendala, serta langkah kedepan/rekomendasi yang dihasilkan setelah berlangsungnya dan pengembangan kepariwisataan di Sulawesi Tengah untuk menguraikan pemasalah dan pemecahan, serta rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam mendukung pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya.

Lampiran

1) Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan sasaran

Dalam mewujudkan pembangunan pariwisata daerah secara terencana, terarah dan berkesinambungan maka Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mendukung Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yakni ***"Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahterah dan Lebih Maju"***

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*Performance Plan*). Tujuan dan sasaran strategik Dinas Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian daerah

Sasaran : - Meningkatkan nilai tambah Sektor pariwisata
- Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif
- Meningkatnya Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara

Tujuan 2 : Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran : - Capaian Realisasi Anggaran
- Nilai SAKIP Dinas Pariwisata
- Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran di rumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula indikator pencapaian sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk di wujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing.

Masing-masing tujuan mempunyai sasaran yang diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan (*suistenable*) dan memiliki ukuran secara nyata terhadap tujuan yang ditetapkan di dalam rencana strategis.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI	KETERANGAN
Meningkatnya jumlah dan lama tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara secara bertahap.	- Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	21.500 orang	1.085 orang	Menurunnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisman dan wisnus disebabkan oleh penyebaran virus Covid 19 secara global di
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pariwisata	- Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara - Lama Tinggal Wisatawan (Hari/Orang)	4.000.000 orang	713.618 orang	

dalam mendukung Daya Tarik Obyek Wisata	1. Mancanegara (hari /orang) 2. Nusantara (hari /orang) - Pengeluaran Wisatawan Harian 1. Mancanegara (USD/hari) 2. Nusantara (Rp/hari)	3 – 5 hari/orang 4 - 7 hari/orang USD 290 /hari Rp. 1.800.000	1 – 2 hari/orang 1 - 2 hari/orang USD 290 /hari Rp. 983.970 /hari	seluruh dunia
Meningkatnya Kualitas Investasi Mitra Usaha yang Tersertifikasi.	Jumlah Investasi Mitra Usaha yang Tersertifikasi	182	280	Bertambahnya jumlah investasi Mitra Usaha
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pariwisata	Jumlah SDM Kepariwisataa yang Berkualitas	540	246	Pandemi juga berdampak dengan penurunan jumlah pelatihan SDM Kepariwisataa karena adanya pemangkasan anggaran yang dialihkan untuk penanggulangan Covid 19

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.
PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya jumlah dan lama tinggal Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara secara bertahap.	- Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara - Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	21.500 orang 4.000.000 orang
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Mendukung Daya Tarik Obyek Wisata	- Lama Tinggal Wisatawan (Hari/Orang) 1.Mancanegara(hari/orang) 2.Nusantara (hari /orang) - Pengeluaran Wisatawan Harian 1. Mancanegara (USD/hari) 2. Nusantara (Rp/hari)	3 – 5 hari/orang 4 – 7 hari/orang 290 USD/hari Rp. 1.800.000 /hari
3	Meningkatnya Investasi Mitra Usaha yang tersertifikasi.	Jumlah investasi Mitra Usaha yang tersertifikasi	182
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pariwisata	Jumlah SDM Kepariwisataaan yang Berkualitas	540

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2021

3.1 A. Capaian Kinerja

Secara umum, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam memenuhi tugas dan fungsi yang harus diwujudkan tahun 2021 maka ditetapkan dalam 6 sasaran dan 9 indikator. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran sehingga diperoleh tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran. Langkah-langkah yang dilakukan terlebih dahulu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi untuk masing-masing komponen sasaran sehingga diperoleh capaian tiap komponen dengan rata-rata seluruh sasaran. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal dan internal tentang sejauhmana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN %	KETERANGAN
Meningkatnya Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara Secara Bertahap.	- Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara - Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	20.000 orang 4.000.000 orang	1.085 orang 713.618 orang	5,05 % 17,84 %	Menurunnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisman dan wisnus disebabkan oleh penyebaran virus Covid 19 secara global di seluruh dunia

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Mendukung Daya Tarik Objek Wisata	- Lama Tinggal Wisatawan (Hari / Orang)	3 – 5	1 – 2	40 %	
	1. Mancanegara (hari /orang)	4 – 7	1 – 2	28,6 %	
	2.Nusantara (hari /orang)	hari/orang	hari/orang		
	- Pengeluaran Wisatawan Harian	290	USD 290	100 %	
	1. Mancanegara (USD/hari)	USD/hari	/hari		
	2.Nusantara (Rp/hari)	1.800.000 Rp/hari	Rp. 983.970 /hari	54,66 %	
Meningkatnya Kualitas Investasi Mitra Usaha yang Tersertifikasi.	Jumlah Investasi Mitra Usaha yang tersertifikasi	182	350	192%	Bertambahnya jumlah investasi mitra usaha
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pariwisata	Jumlah SDM Kepariwisataa yang Berkualitas	540	246	45,56 %	Pandemi juga berdampak dengan penurunan jumlah pelatihan SDM Kepariwisataa karena adanya pemangkasan anggaran yang dialihkan untuk penanggulangan Covid 19.

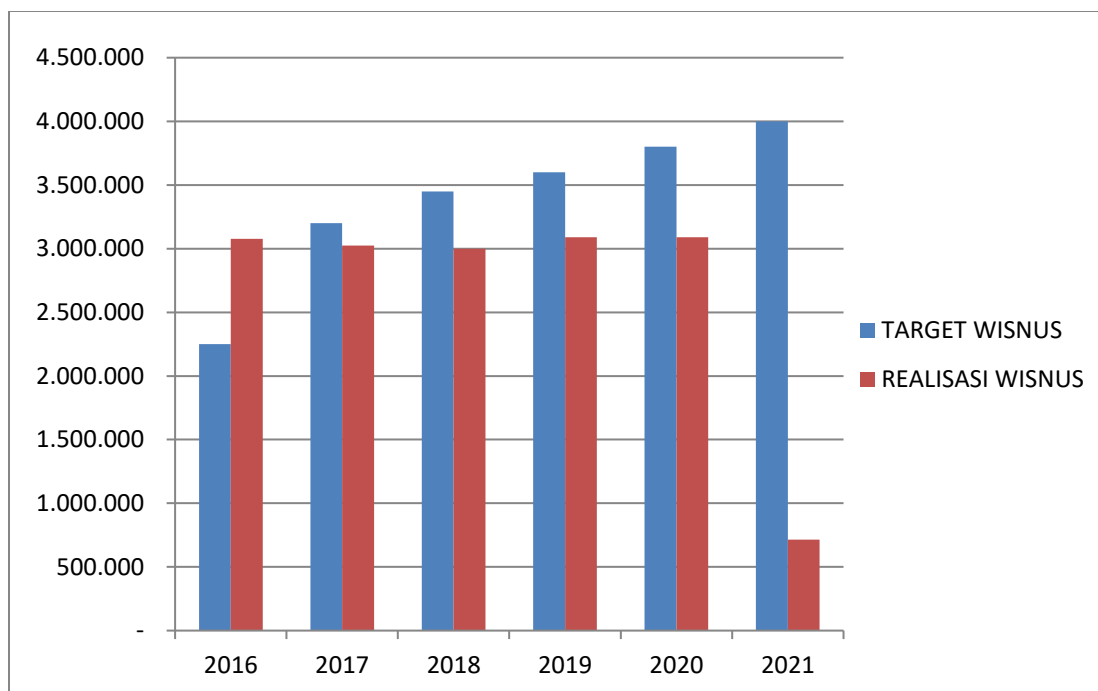
Pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah untuk masing-masing sasaran tahun 2021 telah melaksanakan tugas kerja utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Pariwisata.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 – 2021

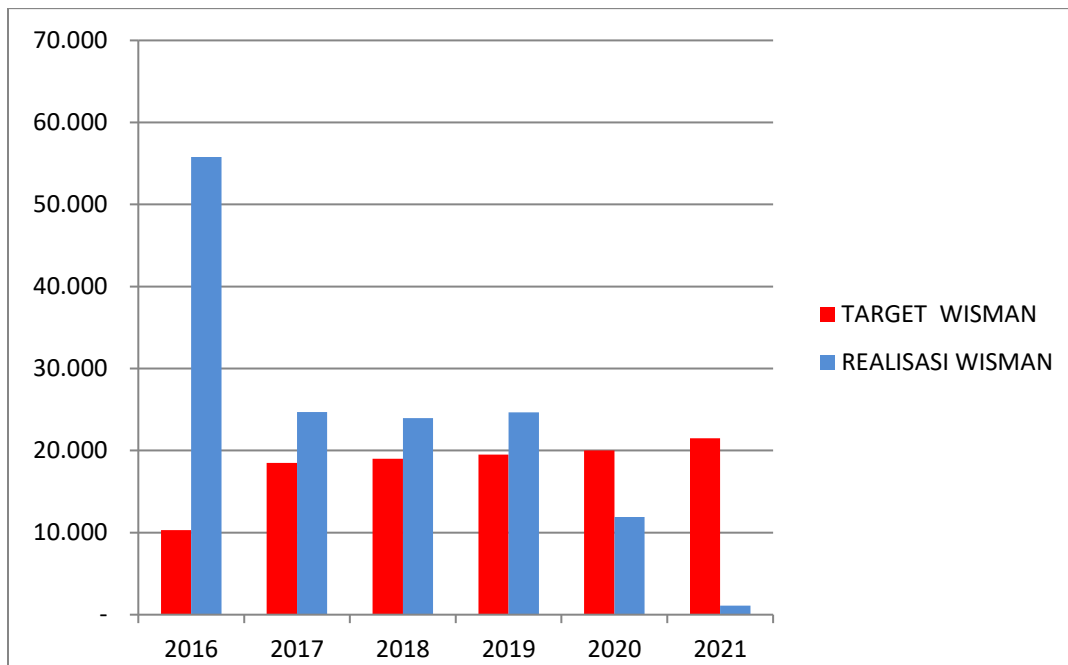
Perkembangan tingkat kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Sulawesi Tengah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 cukup fluktuatif. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 – 2021

NO.	TAHUN	WISATAWAN NUSANTARA (WISNUS)		CAPAIAN (%)
		TARGET (Org)	REALISASI (Org)	
1	2016	2.250.000	3.075.984	136 %
2	2017	3.200.000	3.025.417	95 %
3	2018	3.450.000	3.000.166	87 %
4	2019	3.600.000	3.090.171	86 %
5	2020	3.800.000	3.090.171	86 %
6	2021	4.000.000	713.618	17,85 %



NO.	TAHUN	WISATAWAN MANCANEGERA (WISMAN)		CAPAIAN (%)
		TARGET (Org)	REALISASI (Org)	
1	2016	10.300	55.795	541 %
2	2017	18.500	24.709	134 %
3	2018	19.000	23.942	126 %
4	2019	19.500	24.660	126 %
5	2020	20.000	11.921	59,60 %
6	2021	21.500	1.085	5,05 %



Perkembangan tingkat kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sulawesi Tengah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara umum mengalami peningkatan meskipun pada periode tertentu cukup berfluktuasi. Pada tahun 2016 jumlah wisman berkunjung ke Sulawesi Tengah sebanyak 55.796 orang dengan capaian sebesar 541%, yang mana salah satu sebab peningkatannya adalah karena adanya peristiwa Gerhana Matahari Total (Total Solar Eclipse).

Selanjutnya pada tahun 2017 jumlah wisman berkunjung ke Sulawesi Tengah sebanyak 24.709 orang dengan capaian sebesar 134%, pada tahun 2018 jumlah wisman berkunjung ke Sulawesi Tengah mengalami sedikit penurunan yang disebabkan adanya bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong sehingga jumlah kunjungan hanya sebanyak 23.942 orang dengan capaian sebesar 126%, kemudian pada tahun 2019 jumlah wisman berkunjung ke Sulawesi Tengah sebanyak 24.660 orang dengan capaian sebesar 126%.

Untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah tahun dimana sektor pariwisata mengalami dampak yang sangat signifikan akibat merebak dan menyebarnya pandemi virus corona (covid 19). Pada tahun 2020 kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 11.921 orang (59,60 %) sangat jauh mengalami penyusutan dan ini terjadi secara global, di seluruh dunia dan tahun 2021 jumlah wisman hanya berjumlah 1.085 orang (5,05%) diakibatkan mobilitas masyarakat yang terbatas dengan diberlakukannya lockdown di mancanegara dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di dalam negeri serta penutupan berbagai tempat rekreasi dan wisata sebagai bentuk antisipasi penyebaran pandemi, berimbas besar terhadap perputaran roda ekonomi, termasuk juga pada pengurangan tenaga kerja di sektor pariwisata.

Sedangkan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara ke Sulawesi Tengah tahun 2016 meningkat menjadi 3.075.984 orang dengan capaian sebesar 136%, dan pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan nusantara mengalami sedikit penurunan menjadi sebanyak 3.025.417 orang dengan capaian 95%, selanjutnya pada Tahun 2018 kembali mengalami penurunan dengan jumlah kunjungan sebanyak 3.000.166 dengan capaian 87%, kemudian tahun 2019 dengan jumlah kunjungan sebanyak 3.090.171 orang dengan capaian 86 %. Seperti halnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan nusantara pun terimbas dengan adanya pandemi covid 19, yakni hanya sebesar 1.812.995 orang atau hanya 47,7 % dan tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan nusantara mengalami penurunan sebanyak 713.618 orang atau 17,85%.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pariwisata dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD
Tahun 2021-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021-2022	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021	Capaian (%)
1	Meningkatnya Jumlah Wisatawan	- Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	21.500 orang	1.085 orang	5,05%
	Mancanegara dan Wisatawan Nusantara Secara Bertahap.	- Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	4.000.000 orang	713.618 orang	17,85%
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Mendukung Daya Tarik Objek Wisata	- Lama Tinggal Wisatawan (Hari / Orang)			
		1. Mancanegara (hari /orang)	3 – 5 hari/orang	1– 2 hari/orang	40%
		2. Nusantara (hari /orang)	4 – 7 hari/orang	1 – 2 hari/orang	28,6%
		- Pengeluaran Wisatawan Harian			
		1. Mancanegara (USD/hari)	290 USD/hari	USD 290 /hari	100%
		2.Nusantara (Rp/hari)	1.600.000 Rp/hari	Rp.855.615 /hari	53,47%
3	Meningkatnya Kualitas Investasi Mitra Usaha yang tersertifikasi.	Jumlah Investasi Mitra Usaha yang tersertifikasi	182	350	192%

4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pariwisata	Jumlah SDM Kepariwisataa yang Berkualitas	540	246	45,56%
---	---	--	-----	-----	--------

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Perencanaan pembangunan pariwisata Sulawesi Tengah memerlukan sebuah analisis faktor lingkungan internal berupa kekuatan (Strenght) dan kelemahan (weaknesses) dan juga perlu memperhatikan faktor lingkungan eksternal yang meliputi peluang (opportunities) dan tantangan (threaths).

Untuk mengembangkan sektor pariwisata di Sulawesi Tengah, kedua faktor ini sangat diperlukan untuk mengetahui peluang serta kendala apa saja yang harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam tahap selanjutnya yaitu perencanaan.

1. Kekuatan (Strengths)

- Memiliki potensi wisata alam dan budaya yang beragam
- Besarnya potensi sumber daya manusia yang tersedia
- Beberapa Kabupaten telah memiliki Bandar Udara
- Memiliki Potensi bagi pengembangan usaha di bidang Investasi Pariwisata
- Memiliki event dan potensi event yang cukup banyak
- Banyaknya potensi pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- Tingginya potensi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
- Ketersediaan usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- Tingginya potensi SDM yang tersedia berdasarkan angka kelulusan
- Bertumbuhnya usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- Sistem kompensasi dan reward karyawan/SDM yang memuaskan pada industri pariwisata

2. Kelemahan (Weaknesses)

- Diversifikasi produk wisata masih sangat terbatas di destinasi pariwisata
- Potensi sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pariwisata masih kurang
- Terbatasnya sarana transportasi umum ke destinasi pariwisata
- Belum tersedia data dan informasi terkait pemetaan usaha di bidang investasi pariwisata
- Strategi pemasaran belum fokus, belum tajam, belum terarah dan belum terukur.
- Pemasaran belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal
- Perangkat/fasilitas dan SDM pemasaran dan pemasaran digital di Dinas masih rendah
- Kualitas penyelenggaraan event masih rendah
- Belum optimalnya pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- Kurangnya sumber daya yang menggali potensi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
- Kurangnya pembinaan bagi pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif
- Kurangnya optimalnya fasilitasi terhadap pelaku usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- Belum optimalnya SDM yang berkompetensi di bidang Pariwisata
- Rendahnya daya saing SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyebabkan rendahnya daya saing produk
- Potensi SDA yang melimpah namun belum dimanfaatkan secara maksimal dari sisi kreatifitas untuk mengangkat ekonomi kerakyatan sebagai sumber ekonomi baru
- Banyak kandidat di pasar tenaga kerja tetapi sangat sulit menemukan yang memiliki keterampilan spesifik yang dibutuhkan

3. Peluang (Opportunities)

- Posisi Sulawesi Tengah berada pada jalur yang strategis berada pada dua pintu masuk internasional yaitu di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara
- Tren kunjungan wisatawan yang lebih cenderung beralih ke Eco Tourism
- Dibukanya jalur-jalur transportasi baik darat, laut maupun udara
- Taman Nasional Lore Lindu dan Kepulauan Togean telah ditetapkan sebagai Cagar Biosfer
- Banyaknya Eks-wisatawan Jawa-Bali yang mencari destinasi wisata alternatif
- Adanya kecenderungan Pelaku usaha di Prov tetangga yang menjual destinasi kepulauan Togean dan Poso/TNLL
- Kesempatan promosi digital yang terbuka bagi pelaku usaha melalui beberapa platform populer seperti Travel Advisor, Air BnB, Traveloka dll
- Ketersediaan dan kesediaan warga asal Sulawesi Tengah di Eropa untuk membantu promosi wisata
- Banyaknya penawaran promosi digital
- Telah ada kesiapan ASITA Bali dan Sulawesi Selatan untuk bekerjasama dalam pemasaran dan mengarahkan wisatawan dari daerah mereka ke Sulawesi Tengah
- Partisipasi media masa cukup baik dalam membantu promosi wisata
- Jumlah industri usaha pariwisata yang berkembang, baik lokal maupun global
- Potensi regulasi yang memudahkan bagi pengusaha untuk melakukan usaha
- Dapat menciptakan perekonomian baru yang mandiri bagi masyarakat
- Menciptakan peningkatan pendapatan perekonomian
- Jumlah industri pariwisata yang bertumbuh pesat di pasar tenaga kerja
- Regulasi pemerintah di bidang ketenagakerjaan yang meringankan dunia usaha industri pariwisata
- Trend bisnis industri kreatif yang menciptakan tenaga kerja dan peluang usaha baru.

4. Ancaman (Threats)

- Kecenderungan degradasi lingkungan pada kawasan destinasi pariwisata cukup tinggi
- Daya saing DTW di Sulawesi Tengah lebih rendah dibanding DTW di daerah lain
- Penetapan penetaan kawasan yang tidak tegas
- Kondisi Daerah Sulawesi Tengah rentan terhadap bencana alam
- Keunggulan promosi Sulawesi Utara
- Daerah rawan bencana seperti banjir, longsor, gempa dan gelombang laut
- Promosi negative (hal-hal yang melukai perasaan wisatawan) masih berlangsung dan menjadi potensi konflik antar warga dengan pelaku usaha pariwisata seperti kegiatan ekonomi yang destruktif, sampah dan sikap warga
- Terjadinya persaingan global dimana setiap negara berhak untuk ikut bersaing tanpa dibatasi wilayah
- Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mengakibatkan persaingan tenaga kerja di kawasan ASEAN akan lebih kompetitif

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.19.771.646.738,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.21.477.184.003,- Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 7,94%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil akan tetapi efektifitas penggunaan anggarannya tetap tercapai. Hal ini

dilihat dari persentase realisasi penyerapan anggaran Dinas Pariwisata Tahun 2021 yaitu sebesar 92,06 %. Demikian pula pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Seperti pada kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi yang persentase efisiensinya mencapai 25,17 %, selain itu pada kegiatan Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri yang persentase efisiensinya mencapai 11,84 %.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri ataupun kerjasama dengan pihak swasta.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada tahun 2021 Dinas Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam beberapa program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja, yaitu :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi

Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis

Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah

2. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.2 B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021, Dinas Pariwisata memperoleh alokasi anggaran dana sebesar Rp. 21.477.184.003,- dan terserap sebesar Rp. 19.771.646.738,- (92,06%) diantaranya ada beberapa program dan kegiatan yang mendukung realisasi anggaran seperti tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PRESENT ASE	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI BELANJA	
1	Meningkatkan kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian daerah	1. Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pariwisata	0.50%	0.48%		PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 1.958.692.455	Rp 1.911.118.804	97,57		
						Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Rp 105.334.340	Rp 101.247.740			
						Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi					
		2. Meningkatkan Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	713.618 Orang 45 Unit 1 Laporan	713.618 Orang 45 Unit 1 Laporan	100	Perencanaan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi					
						Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Rp 55.802.840	Rp 55.802.840	100	100	
						Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DTW Unggulan Provinsi	Rp 49.531.500	Rp 45.444.900	91,75	95,88	
		3. Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	0.10%	0.10%	100	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 161.807.840	Rp 157.992.840			
						Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					
						Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					
			45 Unit 1 Laporan	45 Unit 1 Laporan	100	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 150.807.840	Rp 147.817.840	98,02	99,01	
						Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 11.000.000	Rp 10.175.000	92,50	96,25	
						Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					
			2 Dokumen 3 Dokumen 1 Kegiatan 8 Paket 1 Laporan 1 Laporan	2 Dokumen 3 Dokumen 1 Kegiatan 8 Paket 1 Laporan 1 Laporan	100	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					
						Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 1.257.059.275	Rp 1.238.522.549			
						Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 20.124.000	Rp 15.058.924	74,83	87,41	
	1 Kegiatan 8 Paket 1 Laporan 1 Laporan	1 Kegiatan 8 Paket 1 Laporan 1 Laporan	100	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 306.433.350	Rp 304.726.600	99,44	99,72			
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 53.385.000	Rp 49.705.000	93,11	96,56			
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 752.314.900	Rp 748.840.000	100	100			
	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	100	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 32.674.750	Rp 31.874.750	97,55	98,77			
				Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 92.127.275	Rp 88.317.275	95,86	97,93			
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan DestinasiPariwisata Provinsi							
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 434.491.000	Rp 413.355.675							
		Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 51.343.000	Rp 49.768.000	96,93	98,46					
		Penerbitan TDUP Lintas daerah Kab/Kota									
		Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan 3 Laporan	1 Laporan 3 Laporan	100						
		Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pariwisata									
		Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata									

2	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	1. Capaian realisasi anggaran	97%	92,06%	100	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 1.429.680.100	Rp 1.353.022.276	94,64				
						Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Rp 1.429.680.100	Rp 1.353.022.276					
						Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Rp 127.065.250	Rp 123.165.250	96,93				
						Peningkatan Peran Masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Rp 216.559.000	Rp 202.338.944	93,43				
						Pelatihan berbasis kompetensi bidang Homestay dan Pemandu wisata (Tour Guide) tingkat Lanjutan	Rp 327.537.000	Rp 320.292.250	97,79				
						Facilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata							
						Pelatihan asesor kompetensi/ workplace asesor (WPA)	Rp 237.590.300	Rp 218.888.699	92,13				
						Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC)							
						Facilitasi Pendidikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 bidang Pariwisata	Rp 167.636.400	Rp 138.658.983	82,71				
						Facilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Rp 250.998.150	Rp 247.911.750	98,77				
						Facilitasi pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp 102.294.000	Rp 101.766.400	99,48				
						Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf							
						PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF							
						Pelatihan, Bimbingan Tehnis, dan Pendampingan Ekraf							
Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha													
Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekraf													
2	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	1. Capaian realisasi anggaran	97%	92,06%	100	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 15.300.639.473	Rp 13.888.320.689	90,77				
						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 935.204.500	Rp 885.284.421					
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 882.704.500	Rp 832.784.421	94,34				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	100				
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	100				
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.876.263.553	Rp 7.587.927.384					
						Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7.630.893.803	Rp 6.382.958.444	83,65				
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1.192.800.000	Rp 1.153.504.190	96,71				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 52.569.750	Rp 51.464.750	97,90				
						2. Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	8 Dokumen	13 Laporan	5 Laporan	24 Dokumen	12 Dokumen	1 Laporan	
							3. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	8 Dokumen	13 Laporan	5 Laporan	24 Dokumen	12 Dokumen	1 Laporan
								8 Dokumen	13 Laporan	5 Laporan	24 Dokumen	12 Dokumen	1 Laporan
								8 Dokumen	13 Laporan	5 Laporan	24 Dokumen	12 Dokumen	1 Laporan

32

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Secara umum Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategik, meskipun sebagian kegiatan dikurangi karena refocusing anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi covid 19. Adapun tujuan dan sasaran Pembangunan Pariwisata Daerah Sulawesi Tengah yaitu:

1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Perekonomian Daerah

Sasaran yang ingin dicapai melalui tujuan tersebut yaitu:

1. Meningkatkan nilai tambah Sektor Pariwisata;
2. Meningkatnya jumlah arus kunjungan wisatawan nusantara;
3. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif.

2. Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran yang ingin dicapai melalui tujuan tersebut yaitu:

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat ;
2. Capaian Realisasi Anggaran;
3. Nilai SAKIP Dinas Pariwisata;

Tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata daerah sulawesi tengah yang telah ditetapkan tersebut, seluruhnya telah selesai dilaksanakan dan telah berhasil dengan baik dengan capaian kinerja **92.06%**. Proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pencapaian kinerja, dari 5 program dan 15 kegiatan yang ditetapkan, semua telah mencapai kinerja sasaran yang diharapkan.

Dari capaian tersebut, sudah sesuai dengan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian program ini adalah pada tingkat hasil (Outcome). Organisasi telah dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran baik program maupun kegiatan.

4.2. pRencana Tindak Lanjut Peningkatan Kinerja

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja yang dicapai serta agar lebih efektif pelaksanaan kegiatan yang berhubungan pada pencapaian sasaran dan strategis maka di rekomendasikan beberapa hal antara lain :

1. Berkaitan dengan masih merebaknya pandemic covid 19, sehingga tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang, maka sebaiknya pelaksanaannya secara virtual melalui aplikasi-aplikasi meeting digital seperti zoom, webinar, dsb. Walaupun tetap ada pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan secara langsung maka jumlah pesertanya harus dibatasi dan mengikuti protokol kesehatan (prokes).
2. Untuk lebih meningkatkan kinerja Aparatur maka diperlukan peningkatan kualitas SDM secara bertahap sesuai kondisi keuangan yang dimiliki.
3. Perlunya pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata yang dimiliki kab/kota dengan memperhatikan kemampuan anggaran.
4. Penentuan target indikator pada semua tataran agar ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan alokasi dana final yang telah ditetapkan sehingga tidak menyulitkan dalam pencapaian target indikator.

5. Untuk program kegiatan yang dibiayai oleh pusat (APBN/Pembantuan) agar dilakukan koordinasi baik ditingkat Propinsi/Kabupaten/Kota maupun ditingkat Pusat agar sinkronisasi anggaran program dengan APBD dapat direncanakan sesuai dengan RENSTRA yang telah ditetapkan bersama.

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



**Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640919 199003 1 019**